

**LEGAL ANALYSIS ON CORPORATE GOVERNANCE AS A
MECHANISM TO ENSURE CORPORATE RESILIENCE: A CASE
STUDY OF PT CITILINK INDONESIA'S STRATEGIC RESPONSE TO
COVID-19 PANDEMIC AND THE FINANCIAL DISTRESS OF ITS
PARENT COMPANY**

Aisya Kirana Quartiannisa¹ and Royhan Akbar²

ABSTRACT

This legal research analyzes corporate governance as a mechanism for corporate resilience, using PT Citilink Indonesia's response to the COVID-19 pandemic and the financial distress of its parent company, Garuda Indonesia, as a case study. It addresses: (i) how reforms to Indonesia's governance framework, aligned with OECD Principles, can strengthen resilience during crises; and (ii) how Citilink applied governance strategies to address financial and operational constraints.

Employing a normative–empirical approach, this legal research combines doctrinal analysis of laws, regulations, and OECD principles with empirical insights from interviews, annual reports, and regulatory documents.

The findings show, first, that harmonizing Indonesia's governance framework with OECD principles while embedding them in domestic legal and constitutional structures can enhance resilience in times of systemic crisis. Second, reforms must translate into enforceable mechanisms supported by credible oversight and institutional independence. Third, the Citilink case underscores the importance of governance practices that protect stakeholder interests, ensure transparency in group transactions, and maintain operational adaptability under stress. Taken together, the research demonstrates that embedding international principles within Indonesia's legal framework strengthens corporate continuity while supporting broader socio-economic stability.

Keywords: Corporate Governance, Corporate Resilience, OECD Principles, COVID-19 Pandemic, Citilink Indonesia, Garuda Indonesia, Distress

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2021).

² Lecturer at Departmentn of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

**ANALISIS HUKUM TENTANG CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
MEKANISME UNTUK MEMASTIKAN KETAHANAN KORPORASI:
STUDI KASUS RESPONS STRATEGIS PT CITILINK INDONESIA
TERHADAP PANDEMI COVID-19 DAN FINANCIAL DISTRESS INDUK
PERUSAHAAN**

Aisya Kirana Quartiannisa¹ dan Royhan Akbar²

INTISARI

Penelitian hukum ini menganalisis corporate governance sebagai mekanisme untuk menjaga ketahanan korporasi dengan menggunakan studi kasus respons PT Citilink Indonesia terhadap pandemi COVID-19 dan kondisi financial distress induk perusahaannya, Garuda Indonesia. Penelitian ini membahas: (i) bagaimana reformasi kerangka governance di Indonesia yang selaras dengan Prinsip OECD dapat memperkuat ketahanan pada masa krisis; dan (ii) bagaimana Citilink menerapkan strategi tata kelola untuk menghadapi kendala keuangan dan operasional.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian hukum ini menggabungkan analisis doktrinal atas peraturan perundang-undangan dan Prinsip OECD dengan wawasan empiris yang diperoleh dari wawancara, laporan tahunan, serta dokumen regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa harmonisasi kerangka tata kelola Indonesia dengan Prinsip OECD, apabila diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan konstitusional domestik, dapat meningkatkan ketahanan pada masa krisis sistemik. Kedua, reformasi harus diwujudkan dalam mekanisme yang dapat ditegakkan serta didukung oleh pengawasan kredibel dan independensi institusional. Ketiga, studi kasus Citilink menegaskan pentingnya praktik tata kelola yang melindungi kepentingan pemangku kepentingan, menjamin transparansi dalam transaksi grup, dan menjaga adaptabilitas operasional di bawah tekanan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip internasional dalam kerangka hukum Indonesia memperkuat keberlanjutan korporasi sekaligus mendukung stabilitas sosial-ekonomi yang lebih luas.

Kata Kunci: Corporate Governance, Ketahanan Korporasi, Prinsip OECD, Pandemi COVID-19, Citilink Indonesia, Garuda Indonesia, Financial Distress

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada